

## RESPON TOKOH MUSLIM TERHADAP DEMOKRASI

**Basman**

Pascasarjana IAIN Ambon

[basman@yahoo.com](mailto:basman@yahoo.com)

**Abstract:** Democracy is seen as a political system and the best way of regulating life for every society that calls itself modern. Governments everywhere, including totalitarian regimes, try to convince the world community that they have a democratic political system. The discourse of democracy for most people, has become the dominant political discourse. That is why even the most authoritarian dictators must speak the language of democracy. Most Europeans think that the concept of Islamic democracy is such an antitheme that it is impossible to understand the appeal and power of Islamic movements. Because democracy is a concept that is still being debated, it is important to study how the perception of democracy among Islamic leaders in the recent era of the Islamic revival movement is. This type of research is library research, namely research in which the primary data source and secondary data source are literature. Data collection techniques were carried out by direct and indirect citations. The data analysis is carried out by content analysis, which is an effort to describe and analyze in depth the contents of a written or printed information objectively and systematically to reveal the message contained in it. This paper aims to describe the concept of democracy, the ways, attitudes and responses of Muslims to it. Can democracy be implemented and how efforts of Muslims to uphold democracy.

**Key word:** response; democracy; discussion

**Abstrak:** Demokrasi dipandang sebagai sistem politik dan cara pengaturan kehidupan terbaik bagi setiap masyarakat yang menyebut diri modern. Pemerintah di manapun, termasuk rejim-rejim totaliter, berusaha meyakinkan masyarakat dunia bahwa mereka menganut sistem politik demokratis. Wacana demokrasi bagi sebagian besar kalangan masyarakat, telah menjadi wacana politik yang dominan. Karena itulah para diktator yang paling otoriter sekalipun mesti berbicara dengan bahasa demokrasi. Kebanyakan orang Eropa menganggap bahwa konsep demokrasi Islam merupakan suatu antithema sehingga memustahilkan untuk memahami daya tarik dan kekuatan gerakan-gerakan Islam. Karena demokrasi merupakan konsep yang masih diperdebatkan, penting untuk dikaji bagaimana persepsi tentang demokrasi di kalangan tokoh-tokoh Islam pada era gerakan kebangkitan Islam belakangan ini. Tipe penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang sumber data primernya dan sumber data sekundernya berupa literatur kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengutipan langsung dan tidak langsung. Adapun analisis data ditempuh analisis isi, yaitu usaha menguraikan dan menganalisis secara mendalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak secara obyektif dan sistematis untuk mengungkapkan pesan yang terkandung di dalamnya. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep demokrasi, cara, sikap dan respon umat Islam terhadapnya. Apakah demokrasi dapat diterapkan dan bagaimana peran para tokoh Islam dalam upaya menegakkan demokrasi.

**Kata kunci:** respon; demokrasi; musyawarah

### PENDAHULUAN

Istilah demokrasi muncul bersamaan dengan ide nasionalisme, tradisi, sekularisme, modernitas dan pluralisme agama di era 90-an. Ide ini dikenal dunia

Islam lewat kolonialisme Barat dan pengiriman mahasiswa muslim ke Barat dan Amerika Serikat. Belakangan di Timur Tengah, isu demokratisasi memacu kembali seiring dengan terpecahnya gelombang demokratisasi di Uni Soviet dan Eropa Timur. Selanjutnya Pasca berakhirnya perang Teluk II 1991 dan setelah terjadinya pergolakan politik di Aljazair tahun 1992. Akan tetapi, persoalan demokrasi dunia Islam masih menyisakan kontroversi. Padahal, Islam secara ajaran referensinya lebih ke demokrasi, tetapi pengamat Barat menilai hanya negara Turki dan Indonesia pasca reformasi yang dipandang sebagai negara demokratis. Di sinilah kepentingan menjelaskan demokrasi dalam Islam.

Demokrasi dipandang sebagai sistem politik dan cara pengaturan kehidupan terbaik bagi setiap masyarakat yang menyebut diri modern. Pemerintah di manapun, termasuk rejim-rejim totaliter, berusaha meyakinkan masyarakat dunia bahwa mereka menganut sistem politik demokratis, atau sekurang-kurangnya sedang dalam proses menuju ke arah itu. Karena itu, tidak mengherankan jika demokrasi menjadi salah satu ukuran terpenting dalam tata hubungan dan pergaulan internasional yang semakin saling tergantung dewasa ini.<sup>1</sup> Sebagai tuntutan global, negara-negara muslim juga terlibat dan berusaha menuju ke arah pemerintahan yang demokratis. Tuntutan terhadap demokratisasi semakin marak dalam kancah global dewasa ini. Hanya sedikit pemimpin atau gerakan politik yang mengaku sebagai anti demokrasi, sehingga banyak kalangan yang sepakat bahwa perkembangan politik global yang terpenting di akhir abad XX ini munculnya gerakan prodemokrasi di seluruh belahan dunia dan keberhasilan gerakan itu di banyak negara.<sup>2</sup>

Demokratisasi merupakan tuntutan terhadap pemberdayaan rakyat dalam pemerintahan dan politik yang semakin marak diserukan oleh rakyat di seluruh dunia. Secara teoritis, ada sejumlah metode untuk meningkatkan partisipasi dan

---

<sup>1</sup>Samsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia, Gagasan dan Pengalaman* (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 3

<sup>2</sup>Samuel Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman, Ok.: University of Oklahoma Press, 1991), h. xiii.

pemberdayaan rakyat dalam pemerintahan. Namun, di akhir abad XX ini, cara yang paling luas diterima untuk mengungkapkan aspirasi tersebut tuntutan demokrasi. Wacana demokrasi bagi sebagian besar kalangan masyarakat, telah menjadi wacana politik yang dominan. Karena itulah para diktator yang paling otoriter sekalipun mesti berbicara dengan bahasa demokrasi. Wacana ini memang kontroversial sebab warisan demokrasi itu kompleks.<sup>3</sup>

Demokrasi sebuah konsep yang pada dasarnya masih diperdebatkan, Bagaimana pandangan W.B.Gallie. ia menandakan bahwa ada perselisihan pandangan menyangkut konsep-konsep semacam itu. Meskipun tidak dapat diselesaikan dengan argumen apapun, konsep-konsep tetap dipertahankan melalui sejumlah argumen dan bukti yang sangat layak dihormati. Inilah yang Gallie maksudkan dengan pernyataan bahwa ada konsep-konsep yang pada dasarnya masih diperdebatkan, konsep-konsep yang pemanfaatannya mau tidak mau mengundang perselisihan yang tiada hentinya di kalangan pengguna konsep tersebut.<sup>4</sup> Gallie mengemukakan, ketika orang bekerja berdasarkan konsep yang pada dasarnya masih diperdebatkan, maka usahanya tersebut harus diakui. Gallie mengakui bahwa suatu konsep pada dasarnya masih diperdebatkan mengisyaratkan pula pengakuan tentang pemanfaatan yang berbeda-beda, bukan hanya sesuatu yang mungkin secara logis dan juga mungkin secara manusiawi, melainkan sebagai nilai kritis yang potensial secara permanen bagi pemanfaatan atau tafsir orang itu sendiri atas konsep tersebut. Sedangkan menganggap setiap pemanfaatan yang berbeda sebagai anak, musuh, atau gelas berarti merendahkan atau mengabaikan sama sekali pendapat orang lain yang berbeda dengannya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>John L. Esposito & John O. Voll, *Demokrasi di Negara- Negara Muslim* terjemahan Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1999, h. 14.

<sup>4</sup> W.B. Gallie, *Philosopy and Historical Understanding* (Londong: Chatto and Windus, 1964, h. 55.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 187-188

Ironis, dalam konteks global dewasa ini, menurut Eesposito, kebanyakan pendukung demokratisasi masih belum mengakuinya sebagai suatu konsep yang masih diperdebatkan. Mereka menganggap orang lain yang menafsirkan demokrasi secara berbeda sebagai menyimpang dan tidak waras sehingga mereka cenderung merendahkan kekuatan alternatif alternatif yang ada. Hal ini terutama tampak jelas di kalangan pendukung demokrasi di Eropa Barat dan Amerika Serikat yang meyakini diri mereka sebagai ahli waris sejati satu-satunya tradisi demokrasi yang sah. Dengan demikian, mereka menganggap setiap upaya pihak lain untuk menciptakan demokrasi sebagai tindakan keliru dan tidak demokratis.<sup>6</sup> Dampak dari pandangan tersebut, kebanyakan orang Eropa menganggap bahwa konsep demokrasi Islam merupakan suatu antithema. Pendapat tersebut memustahilkan untuk memahami daya tarik dan kekuatan gerakan-gerakan Islam. Karena demokrasi merupakan konsep yang masih diperdebatkan, penting dipahami bagaimana persepsi demokrasi di kalangan gerakan kebangkitan Islam belakangan ini.

Tulisan ini mendeskripsikan konsep demokrasi, cara, sikap dan respon umat Islam terhadapnya. Apakah demokrasi dapat diterapkan dan seberapa jauh peran para tokoh Islam dalam upaya menegakkan demokrasi, ataukah sebaliknya para tokoh Islam menghambat proses demokratisasi.

## **I. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah library research (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang sumber data primernya dan sumber data sekundernya berupa literatur kepustakaan, berupa buku-buku, artikel jurnal dan ensiklopedia yang berkaitan dengan obyek penelitian, yakni demokrasi dan tokoh-tokoh filosof muslim dan barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengutipan langsung dan tidak langsung. Adapun analisis data ditempuh analisis isi, yaitu usaha menguraikan dan

---

<sup>6</sup> John L. Esposito & John O. Voll, *Demokrasi*,...h. 15

menganalisis secara mendalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak secara obyektif dan sistematis untuk mengungkapkan pesan yang terkandung di dalamnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Akar Historis Demokrasi**

Sebelum berbicara lebih jauh, terlebih dahulu dikemukakan pengertian demokrasi untuk mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud demokrasi itu. Kemudian mengemukakan sejarah perjalanan demokrasi untuk memahami liku-liku perjalanan demokrasi sejak zaman kuno sampai zaman modern.

#### **1. Pengertian Demokrasi**

Diskursus demokrasi (Yunani: *demoskratos*) ini erat kaitannya dengan sistem pemerintahan atau ketatanegaraan yang lekat dengan dua istilah lainnya, yaitu monarki dan oligarki. Monarki (Inggris: *monarchy*) merupakan bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh seorang raja. Sedangkan oligarki menunjukkan bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh sedikit atau sejumlah orang.

Adapun demokrasi menunjukkan bentuk pemerintahan yang ada pada rakyat. Dalam pengertian luas demokrasi berarti suatu pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang berwenang (rakyat).<sup>7</sup> Karena kekuasaan ada pada rakyat, maka pemerintahan yang demokratis tidak berhak melakukan pemaksaan terhadap pengungkapan pendapat, pers, kebebasan berkumpul dan kebebasan memilih, dan lain-lain.<sup>8</sup> Ini karena sistem demokrasi menolak diktatorisme feodalisme dan totalitarianisme. Dalam demokrasi, hubungan antara penguasa dengan rakyatnya bukanlah hubungan kekuasaan tetapi berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi

---

<sup>7</sup>James H. Smyline, "Theocracy" dalam *The Enciclopedia Americana* vol.8 (Danburg Connetcticul USA: Glolier Incorporated, 1985), h. 684.

<sup>8</sup> Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 29.

HAM Franz magnis Suseno menyebut demokrasi *majority rule, minority right*<sup>9</sup> (menjunjung prinsip mayoritas dan tidak mengganggu kepentingan minoritas).

Menurut Nurcholis, Madjid, demokrasi sebagai *way of life* harus menjunjung prinsip kesadaran kemajemukan, prinsip musyawarah, prinsip cara harus sejalan dengan tujuan, prinsip pemufakatan yang jujur, prinsip pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perencanaan budaya, prinsip kebebasan Nurani dan prinsip perlunya pendidikan politik.<sup>10</sup> Tetapi bagaimanapun implementasi demokrasi pada suatu pemerintahan negara dapat berbeda mengakui perbedaan corak politik yang berlaku, kondisi sosial rakyat dan operasionalisasi sistem ekonominya.

Ada kecenderungan kuat bahwa saat ini demokrasi diartikan banyak negara dalam kaitannya dengan sistem perwakilan. Keputusan tidak dicapai atas hasil suara keseluruhan penduduk, tetapi atas wakil-wakil rakyat yang terpilih. Ini mengisyaratkan bahwa pemilihan seharusnya dilakukan oleh warga negara dengan bebas tanpa intimidasi.<sup>11</sup> Selain itu demokrasi juga menekankan jaminan kebebasan sipil yang meliputi: kebebasan pers, kebebasan berbicara dan kebebasan berorganisasi yang dilindungi undang-undang.

Ada tiga anggapan umum yang melekat dalam konsep sistem demokrasi sebagaimana dikemukakan Samuel P. Huntington. Pertama, demokrasi bukan hanya membentuk pemerintahan yang dapat diterima tetapi juga merupakan suatu doktrin politik yang akan menguntungkan banyak negara. Asumsi ini banyak mendapat dukungan Amerika Serikat yang mengklaim dirinya sebagai model negara demokrasi modern. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan mempunyai akar sejarah sejak zaman Yunani kuno dan sebagai bentuk ideal bertahan selama beberapa

---

<sup>9</sup> Sukron Kamil, "Islam dan Demokrasi: Analisis Konseptual dan Historis" dalam Jauhar, *Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*, Vol. 1, No. 1, Desember 2000, h.114-115.

<sup>10</sup> Lihat C. W. Cassinelli, *The Politic Of Freedom: An Analisis Of The Modern Democratic State* ( Seatle: University Of Wangshington Press, 1961).

<sup>11</sup>R. Siti Zuhro, "Demokrasi: Suatu Tinjauan Teoritis" dalam *Jurnal Ilmu Politik*,No. 14, Jakarta: AIPI & LIPI bekerja sama dengan gramedia,1993, h. 32.

abad dalam situasi politik yang penuh gejolak. Ketiga, demokrasi dipandang sebagai suatu sistem yang "natural", dalam arti jika rakyat di negara manapun dapat memenangkan kebebasannya untuk menentukan sendiri sistem politik mereka, besar kemungkinannya mereka akan memilih demokrasi.

Perlu diketahui bahwa pandang tersebut masih diperdebatkan titik ada perbedaan-perbedaan penting dalam praktek-praktek demokrasi dari suatu negara dengan negara lainnya sehingga perumusan definisi demokrasi tidak semudah yang dibayangkan. Contoh, suatu negara mungkin dipandang demokratis jika negara tersebut memiliki sistem parlemen, sistem partai dan pemilihan umum. Jika bentuk-bentuk formal itu menjadi dasar acuan untuk mengukur kualitas demokrasi disuatu negara, maka banyak negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi.<sup>12</sup>

Demokrasi secara harfiah, diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Jika pemerintahan oleh rakyat tersebut diartikan sebagai keikutsertaan seluruh rakyat dalam menyusun dan mengarahkan kebijakan nasional, dapat dipastikan demokrasi tidak akan pernah dan tidak mungkin terwujud untuk masa yang akan datang. Sejak abad XIX masehi mulai tampak pergeseran makna demokrasi. Demokrasi dalam abad itu diartikan sebagai pemerintahan oleh beberapa orang atau sedikit orang atas nama keseluruhan penduduk. Sampai saat ini, ide bahwa setiap individu sepatutnya memiliki paling tidak kesempatan yang sama untuk menjadi bagian salah satu dari kelompok yang sedikit tadi untuk berbagai tugas dengan tingkat eksekutif di atasnya masih belum bisa diterima.<sup>13</sup> Contoh, di Inggris *agnostics* tidak bisa menjadi anggota parlemen sampai akhir abad ke sembilan belas. Anggota pemerintah waktu itu masih dibatasi oleh sistem *nobility*, priyai dan kelas menengah.

Dari pengertian demokrasi tersebut dapat dipahami bahwa demokrasi bisa disepakati sebagai pemerintahan oleh rakyat. Namun, mengenai sistem yang diterapkan masih diperselisihkan karena suatu kemustahilan untuk melibatkan seluruh

---

<sup>12</sup>Dorothy Picles, *Democracy* (London: B.T. Batsford Ltd., 1970), h. 10-12.

<sup>13</sup>Crane Brintin at. All., *A History of Civilization*, Vol. 1 (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1962), h. 46 dan 64-67.

rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan suatu pemerintahan. Karena masih diperdebatkan itulah, tidak satupun negara yang berhak mengklaim diri mereka sebagai model demokrasi yang paling baik dan menganggap negara lain yang tidak sama dengan klaim mereka sebagai negara yang tidak demokratis.

## **2. Masa Klasik**

Demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan telah dikenal oleh masyarakat primitif. Demokrasi langsung merupakan salah satu cara mengorganisir suatu komunitas politik yang paling jelas. Bentuk demokrasi ditemukan dalam banyak masyarakat primitif yang dikenal oleh para antropolog. Tidak diragukan bahwa asal-usul demokrasi merujuk pada masa prasejarah. Namun demikian dalam tradisi politik Barat, awal kemunculan ide demokrasi dikaitkan dengan Negara kota Yunani kuno.<sup>14</sup> Kata demokrasi itu sendiri diturunkan dari istilah Yunani *demokratia*, dari kata *demo* (oeple-rakyat), dan *kratos* (rule-aturan). Plato dan Aristoteles, yang merintis upaya menciptakan teori sistematis tentang teori politik, mengakui demokrasi sebagai salah satu dari lima atau enam tipe pemerintahan. Definisi tentang demokrasi yang diajukan Aristoteles, "Demokrasi adalah suatu negara, tempat orang-orang yang bebas dan orang-orang yang miskin, dalam kondisi mayoritas, diikutsertakan dalam kekuasaan negara."<sup>15</sup>

Demokrasi yang dirujuk ke dalam definisi ini dalam banyak hal secara fundamental berbeda dengan demokrasi di zaman modern. Demokrasi langsung struktur warga negara membentuk legislatur, dan bentuk yang representative tidak dikenal. Ini boleh jadi karena ukuran negara-negara kuno yang terbatas, yang secara umum terbatas di sebuah kota dan lingkungan lingkungannya yang rural serta jarang memiliki lebih dari sepuluh warga. Demokrasi kuno tidak saja dapat dibandingkan dengan perbudakan, ia Mempradugakan memperbedakan yang semata-mata

---

<sup>14</sup> Fredrick Mundell Watkins, "Democracy", dalam *Encyclopedia Britannica* (Chicago, dll: Encyclopedia Britannica, Inc., 1970), h. 16.

<sup>15</sup> *Ibid.*



mengizinkan kesenangan yang diperlukan bagi warga negara untuk mengabdikan diri mereka bagi urusan-urusan publik. Ia mengakui kesamaan warga negara, tetapi gagal mengembangkan konsepsi umum tentang persamaan untuk seluruh kemanusiaan.<sup>16</sup>

Seluruh warga negara dalam demokrasi kuno ditandai dengan keikutsertaan dalam Dewan Legislatif dan memberikan suara. Mereka juga memiliki yang sama untuk berbagai urusan eksekutif dan yudikatif yang lebih luas. Tidak ada pemisahan kekuasaan, dan seluruh pengurus seluruhnya bertanggung jawab terhadap dewan populer yang dikualifikasikan untuk bertindak dalam masalah-masalah eksekutif yudikatif dan juga legislatif.<sup>17</sup>

Demokrasi berkembang di Yunani kuno terutama selama abad V sebelum Masehi. Sejarah politik dari periode ini tercakup dalam perjuangan antara negara demokrasi dan yang Athena dan Sparta merupakan contoh representative. Warga Athena orang pertama yang mencoba membentuk imperium demokratis. Demokrasi Yunani berakhir dengan kejatuhan api ada niat tidak pernah pulih kembali.<sup>18</sup> Dengan demikian, demokrasi Yunani merupakan episode sejarah singkat yang sedikit saja memiliki pengaruh langsung terhadap teori ataupun praktek negara demokrasi modern. Meskipun terdapat sejumlah bukti bahwa teori-teori berdemokrasi politik berkembang dengan baik pada masa itu, tetapi tulisan-tulisan ini tidak pernah berkelanjutan sebagai bagian dari tradisi politik barat. Para filosof terkenal abad IV- yang sebenarnya kamu muslim banyak berhutang budi kepada mereka atau sebagian besar pengetahuan yang didapatkan menginap pemikiran politik ekonomi justru anti demokrasi.<sup>19</sup>

### **3. Masa Modern**

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

Terdapat rentang waktu sekitar 2000 tahun dalam praktek dan teori mengenai demokrasi di negara kota Yunani sampai kemunculan konstitusionalisme modern. Romawi merupakan sebuah Republik oligarkri yang secara bertahap berubah menjadi Imperium otokratis. Negara-negara yang muncul sesudahnya kerajaan yang bercorak kekuasaan ataupun feodal, yang Sepanjang Abad XVI dan XVII menjadi monarki absolut. Pola umum pemerintahan tidak diikuti secara universal. Monarki Inggris, selama abad XVII gagal memperbaiki klaim absolutisme, dan jatuh di bawah kontrol tuan tanah.<sup>20</sup>

Abad pertengahan, meskipun juga ditandai dengan kemunculan sejumlah Republik Independen, tetapi republik-republik ini pada umumnya lebih bercorak oligarki dari pada demokratis. Demokrasi dalam perkembangannya secara aktual, mendorong munculnya kekerasan dan institusi yang berbuat banyak untuk menentukan karakter khas dari pemerintahan demokrasi modern. Tidak seperti demokrasi langsung dari Yunani kuno, negara-negara demokrasi dewasa ini pada umumnya negara negara konstitusional dan memiliki lembaga perwakilan dengan ditandai kecenderungan kepada demokrasi ekonomi. Instrumen pemerintahan yang mendasar legislator yang representative atau parlemen. Basis Etik yang mendasarinya konsepsi bahwa semua manusia diciptakan sama, dan bahwa pemerintahan terwujud untuk tujuan melindungi mereka dalam melaksanakan hak-hak dasar tertentu. Semua ini tampaknya sulit dipahami bila dikaitkan dengan Yunani kuno dengan ciri khas kepemilikan budak dan warga yang mengatur diri sendiri. Perbedaan ini hanya dapat dimengerti sebagai perkembangan luar dari gagasan dan institusi baru, yang secara bertahap muncul Selama abad Tengah.<sup>21</sup>

Bagi teologi Kristen, alam semesta adalah ciptaan Tuhan dengan kehendak Yang Maha sempurna dan tak berubah mengikat seluruh ciptaannya. Kehendak ini diketahui oleh manusia sebagian melalui Wahyu, seperti di interprestasi oleh gereja

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

dan sebagian melalui akal natural. Oleh karena itu, Sepanjang Abad Tengah, Raja tunduk kepada tiga jenis hukum; (1). Hukum Tuhan yang diwahyukan (2). Hukum akal yang bersifat natural (3). Hukum kebiasaan dari negara. Hukum-hukum ini bukan merupakan produk tetapi sebagai sumber otoritas yang legitimatif; dan siapapun yang melanggar hukum-hukum dianggap sebagai hukum Tiran dan bukan sebagai penguasa yang sah. Pandangan modern tentang supremasi hukum konstitusional diwariskan secara langsung dari konsep abad Tengah ini.<sup>22</sup>

Praktik modern ini naik ke teluk film juga berasal dari abad tengah. Praktik ini muncul sebagai konsekuensi dari distingsi otoritas negara yang diikuti dengan kejatuhan Romawi. Imperium Romawi merupakan negara yang berpusat secara kuat dan sepenuhnya mampu memposisikan kehendaknya kepada populasi warga. Dalam monarki suku dan feodal yang menggantikannya, kekuasaan disebar jauh lebih luas. Para pemuka feodal, otoritas gereja dan kota-kota yang di sewah semuanya memperoleh kekuasaan dan otoritas sendiri. Karena berbagai tujuan, terutama untuk menaikkan pajak-Pajak yang baru, Raja hanya dapat bertindak dengan persetujuan warga. Instrumen normal untuk mengamankan persetujuan ini dengan mengumpulkan suatu dewan wilayah yang besar. Pada mulanya warga yang ikut serta itu kaum ningrat temporal dan gereja, yang karena cukup kaya dan berkuasa memiliki kontribusi penting titik namun, terdapat juga kelompok-kelompok badan hukum, terutama kota-kota yang disewah, yang kekayaannya menyediakan banyak arti.

Tatanan politik abad Tengah yang mengalami disintegrasi di abad XV dan abad XVI karena kekuasaan raja yang bertambah dan pembatasan-pembatasan hukum, memberi ide tentang kedaulatan absolut. Perkembangan ini secara natural bertemu dengan sejumlah besar penolakan. Selama abad XVI bahkan terdapat kebangkitan singkat Konsep politik abad Tengah. Banyak orang Kristen, baik Protestan maupun Katolik, bereaksi terhadap kesulitan-kesulitan keagamaan periode tersebut dengan menuduh raja-raja dari keyakinan yang berseberangan sebagai tiruan,

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

dan meminta mereka turun Tahta ditangan dewan wilayah yang terbentuk secara sah. Pendukung pandangan ini, yang dikenal sebagai *monarchomachists*, menghasilkan tulisan-tulisan yang se-jumlahnya memainkan peran tertentu dalam perkembangan teori-teori populer tentang kedaulatan. Namun pada masanya mereka pada umumnya tidak sukses, dan menjelang pertengahan abad ketujuh belas monarki absolut terbentuk secara mapan sebagai corak umum pemerintahan Eropa Barat.<sup>23</sup>

Satu-satunya pengecualian. Tradisi parlementarisme masih kuat. Di pertengahan abad XVII, ketika terjadi konflik sekitar isu-isu keagamaan dan konstitusi mengarah kepada perpecahan antara raja dan parlemen, parlemen menang dan menyingkirkan Raja. Menjelang pertengahan abad XVIII, Sudah menjadi kebiasaan bagi Raja, khususnya dalam memilih kabinet, untuk memilih anggota parlemen yang menikmati dukungan mayoritas dan mengabaikan mereka begitu kehilangan dukungan tersebut, ini mencabut monarki dari seluruh kekuasaan yang efektif dan menegakkan supremasi parlemen.

#### **b. Gagasan Teoritis Tentang Demokrasi**

Eropa abad XVII menghasilkan banyak karya tentang politik; tidak terkecuali Inggris, yang beberapa diantaranya telah menjadi klasik bagi pemikiran liberal modern. Di antara tulisan yang berpengaruh risalah kedua dari John Locke (1632-1704) berjudul *of Civil government* (1690). Sasaran polemik tulisan Locke mengurangi penerimaan yang populer atas patriarkalisme, yang memberi otoritas bagi banyak argumen pada masa itu atas absolutisme.<sup>24</sup> Untuk itu Locke mempostulasikan relasi langsung dan orisinil dari setiap manusia dengan Tuhan, bukan dengan atau memiliki perantaraan politik manapun.<sup>25</sup> Setiap demokrasi menurut Locke milik Tuhan. Ini menyatakan bahwa hak milik, yang terdefinisi sebagai kehidupan, kemerdekaan dan tanah merupakan hak alamiah manusia. Pemerintah diciptakan oleh

---

<sup>23</sup>Rosalie L. Colie, "John Locke" dalam David L. Sill (ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol 9, (New York: Macmillan Publishing Company, 1972), h. 466.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup> Brinton, *A History...*h. 58-59.

suatu kontrak sosial yang di desain untuk melindungi hal tersebut, dan ketika pemerintah melanggar terma-terma kontrak, masyarakat berhak untuk menjatuhkan dan menggantikannya. Cara terbaik untuk menghalangi pemerintah dari penyalahgunaan adalah dengan memisahkan kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak pernah jatuh ke tangan orang yang sama. Teori Locke mengenai pemisahan ini menjadi sangat populer di daratan Eropa melalui tangan Montesquieu.

Montesquieu (1689-1755), yang dianggap Hegel sebagai *the first who explain law and political institutions by reference to characteristics of the social system in which they function, melampaui pemikiran locke. dalam karya utamanya, the spirit of the laws (1748)*, Montesquieu mendefinisikan prinsip-prinsip yang mendasari konstitusi Inggris dan pemerintahan secara umum. Mengenai pemerintahan secara umum, Montesquieu berpendapat bahwa keseimbangan harus ditegakkan berdasarkan pemerintahan kekuasaan (*the separation of power*).<sup>26</sup> Montesquieu memisahkan secara jelas antara kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, badan kekuasaan Yudisial. Dia menjadikan pemerintahan yang tegas ini sebagai prasyarat bagi kemerdekaan. Montesquieu berpendapat bahwa "bila kekuasaan legislatif di satukan dengan eksekutif, maka tidak ada lagi kemerdekaan. Begitu pula tidak ada kemerdekaan jika kekuasaan Yudisial tidak dipisahkan dari legislatif. *power must check power*".<sup>27</sup> Jarak besar yang memisahkan rousseau dengan Montesquieu dalam doktrin politik sangat jelas. Bukan saja doktrin rousseau bercorak *Equalotarian* dan anti *Hierarchical*, tetapi pada saat yang sama rousseau adalah *republican* dan anti-*monarchist*.<sup>28</sup>

Kekecewaan yang mendalam atas apa yang terjadi di masanya, Rousseau berbalik mengambil inspirasi kepada model masa klasik. Sparta dan Romawi, lebih

---

<sup>26</sup> Melvin Richter, "Montesquieu" dalam Sill, *International...*h. 472.

<sup>27</sup> Frederick Mundel Watkins, "Democracy" dalam *Encyclopedia Britannica*, Vol. 7, (Chicago, dll. Encyclopedia Britannica, Inc, 1972), h. 217.

<sup>28</sup> Fredrick Mundell Watkins, "Democrasi" dalam *Encyclopedia...* h. 217.

dari Athena, model keunggulan politik bagi Rousseau. Namun, dalam terminologi khususnya, monarki, aristokrasi, dan demokrasi secara sederhana merupakan cara-cara alternatif dalam mengatur cabang eksekutif dari pemerintahan. Ketika mengungkapkan keraguannya tentang demokrasi, secara sederhana Dia mengatakan bahwa sebuah pertemuan massa jarang dapat menangani semua problem sehari-hari dari pelayanan publik.<sup>29</sup> Lebih jauh Rousseau bahkan meragukan bahwa ada negara yang siap untuk bentuk mutlak dari demokrasi dimana banyak orang secara aktual melaksanakan hukum.<sup>30</sup> Namun, ketika persoalan muncul menjadi penyelenggara otoritas kedaulatan, Rousseau merupakan eksponen demokrasi langsung tanpa kompromi, meskipun dia sendiri tidak pernah menggunakan terma tersebut.<sup>31</sup>

Menurut *the social contract*, tidak ada hukum yang sah kecuali jika hukum tersebut merupakan ekspresi dari kehendak umum, yakni suatu konsensus dari keseluruhan komunitas. Tidak ada manusia yang dapat menikmati tanggung jawab moral sempurna, dan begitu pula kenyataannya seorang manusia, kecuali jika ia ikut serta dalam pembentukan konsensus di mana ia terikat secara legal. Ini berarti bahwa manusia harus berkumpul dengan sesama warga pada interval waktu tertentu dan secara pribadi harus memberi suara atas masing-masing dan setiap aktivitas legislasi. Dia juga harus berfikir tentang tanggung jawab memberi suara bagi suatu pemerintahan untuk menyelenggarakan hukum. Jadi pemerintahan yang diciptakan harus sepenuhnya tunduk kepada kehendak umum, sebagaimana terungkap dalam majelis yang populer.<sup>32</sup> Konsepsi mengenai hakikat dan fungsi Dewan Legislatif tampak merupakan versi ulang dari praktek demokrasi Yunani. Karena hanya sesuai

---

<sup>29</sup> Brinto cs. Dalam hal ini mengutip pertanyaan Rousseau dalam “the social Contact” were there a people of gods, their government would be democratic. So perfect a government is not for men. Brinton et. Al., *A History...* h. 60.

<sup>30</sup> Watkins, “Democracy”, dalam *The Encyclopedia...* h. 217.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

dengan negara kota, secara keseluruhan praktek ini tidak cocok dengan kondisi modern.

Tetapi meskipun aplikasi prinsip kehendak umum yang diajukan rousseau tidak realistis, prinsip ini sendiri penting. Jika asumsi tentang tanggung jawab moral adalah esensi kehormatan manusia, pada gilirannya berarti tidak ada manusia tanpa menundukkan dirinya di bawah Tarap humanitas yang dapat tertolak ke ikut sertakan pribadinya dalam membuat keputusan politik yang mendasar. Pembelaan rousseau yang menarik dan tanpa kompromi terhadap proposisi ini merupakan kontribusi penting terhadap teori demokrasi modern.

Dari sudut pandang sejarah Eropa, rousseau pemikir demokrasi terpenting. Ide-idenya mengilhami radikalisme revolusi Prancis hingga hari ini. Namun, dari sudut pandang kontribusi terhadap sejarah Amerika, Montesquieu dan Locke terbukti menjadi pemikir politik *enlightenment* yang paling penting.

Eksperimen penting pertama dalam demokrasi konstitusional ditandai sebagai konsekuensi Revolusi Amerika, meskipun ini bukanlah tujuan primer dari gerakan revolusi ini. Sebab-sebab yang membawa koloni-koloni memisahkan diri dari Negeri induk pada dasarnya sama dengan sebab-sebab yang membawa perpecahan antara raja dan parlemen pada abad ke tujuh belas di Inggris.

Koloni-koloni tersebut memiliki Dewan Legislatif yang berangkat dari parlemen yang sangat sederhana, tetapi dalam perjalanan waktu muncul pemerintahan akan sebuah keutuhan parlementer bagi kekuasaan legislatif dan fiskal. Ketika klaim-klaim tersebut ditolak oleh Gubernur kerajaan yang selaku agen pemerintah Inggris, menekan *Stamp Act* dan ukuran-ukuran lain di bawah wewenang parlemen Inggris, akibatnya adalah krisis konstitusional tipikal abad XVII.

Namun, sulit untuk menegaskan *prevelese* khusus di bawah kondisi persamaan dari sebuah masyarakat Pioneer. Penguasa koloni kurang stabil dibandingkan dengan penguasa Negeri induk, dan jauh lebih rentang terhadap tekanan tekanan demokrasi. Bila penguasa Inggris yang mengontrol berganti, kekuatan-kekuatan demokrasi dalam kehidupan Amerika menjadi bebas untuk

menemukan ekspresi. Apa yang diinginkan oleh Kebanyakan orang Amerika dalam jangka panjang sebuah pemerintahan yang tidak saja konstitusional, tetapi juga demokratis. Ini merupakan signifikansi tertinggi dari Revolusi Amerika.<sup>33</sup>

Jejak kedua dalam sejarah demokrasi modern itu Revolusi Perancis. Prancis bukan merupakan suatu gerakan berdasarkan pada tradisi konstitusional yang mantap. Sejak abad XVI, Perancis telah menjadi monarki absolut dan meskipun sejumlah distrik memelihara kondisi umum provinsinya, sedikit masih mempertahankan tradisi parlementer abad Tengah dan beberapa tokoh revolusioner memiliki kepentingan untuk membangkitkannya. Inspirasi mereka muncul dari filsafat pencerahan, dengan konsepsi mengenai hak manusia yang baru dan radikal.<sup>34</sup>

Sepanjang Abad XVIII para pemimpin kehidupan intelektual Prancis telah menyerukan kesamaan natural yang menuntut *privelese* resmi yang dinikmati oleh para aristokrat dan kelas-kelas istimewa yang lain sebagai pelanggaran terhadap hukum penalaran. Kecuali Rousseau, yang berdiri terpisah dari *manstream* pencerahan, mereka tidak banyak tertarik pada demokrasi politik, tetapi hanya menginginkan persamaan illegal. Mereka tertarik pada monarki absolut sepanjang. Mereka meyakini bahwa raja dapat di bujuk untuk menggunakan kekuasaan mereka dalam kepentingan reformasi yang tercerahkan. Ketika harapan tersebut dikecewakan, para ahli reformer mengalihkan perhatian mereka ke rakyat dan mulai mendukung prinsip kedaulatan yang populer. Secara mendasar para tokoh revolusi itu para reformer legal, yang dengan penuh semangat tertarik kepada kebebasan, persaudaraan dan masa bodoh terhadap sarana politik yang digunakan untuk menjadi tujuan tersebut. Ini menggambarkan semangat reformer yang luar biasa dari Revolusi Perancis dan kesulitan-kesulitan luar biasa yang dijumpai dalam membangun tradisi politik demokrasi yang mapan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Watkin, 'Democracy', dalam *The Encyclopedia...*h. 217.



Revolusi Perancis mengandung efek percampuran yang menakjubkan terhadap perkembangan demokrasi modern. Revolusi Perancis sukses dalam menumbangkan tradisi rezim kuno dan menempatkan ideal tentang masyarakat berdasarkan kebebasan, persaudaraan dan persamaan. Ideal ini terbentuk dalam rangkaian reformasi hukum dasar, dan deklarasi hak-hak asasi manusia hingga *kode napoleon*, yang secara permanen menggantikan wajah Eropa. Para filosof pencerahan yang perhatian utamanya senantiasa berkenaan dengan persamaan hukum Perlihatkan.

Dengan memproklamirkan kedaulatan rakyat dan menegakkan pemilihan dan lebih yang berdasarkan persetujuan suara universal, Revolusi Perancis juga memberikan cikal-bakal yang penuh kekuatan terhadap ide tentang partisipasi populer dalam pemerintahan. Namun, dengan mengasosiasikan Ide ini dengan praktik-praktik kediktatoran Napoleon dan jacobian, gerakan tersebut juga menyebabkan hambatan bagi pertumbuhan institusi-institusi demokrasi.

Meskipun revolusi tersebut, pada tahap awalnya, memperlihatkan preferensi tertentu bagi pemerintahan mayoritas Absolut yang terlaksana melalui dewan-dewan yang dipilih secara demokratis, Iya tidak membuat komitmen serius terhadap bentuk khusus dari pemerintahan. Kebanyakan tokoh revolusi percaya bahwa persamaan sosial dan hukum merupakan sebuah tujuan yang membenarkan penggunaan sarana politik apapun, dan ide ini merupakan salah satu dari warisan terkuat dan yang tersisa dari Revolusi Perancis.<sup>35</sup>

Dari Potret sekilas tentang perjalanan demokrasi baik secara konseptual maupun institusional tampak gagasan-gagasan demokrasi pada dasarnya berkaitan dengan keruntuhan struktur-struktur feodal abad pertengahan dengan gagasan aufklarung rasionalisme, individualisme sekularisme dan terutama kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan.

---

<sup>35</sup> Frans Magnis Suseno, "Demokrasi: Tantangan Universal" dalam M. Nasir Tamara & Elsa Perdi Taher (eds.) *Agama Dialog Antar Peradaban*, (Jakarta: Paremadi, 1996). H. 128.

Gagasan ini memunculkan keyakinan bahwa semua orang sama martabatnya, dan oleh karena itu mereka memiliki hak yang sama atas partisipasi dalam menentukan arah komunitas mereka dan bahwa tidak ada orang yang memiliki hak Ilahi untuk memerintah orang lain.

Segala kekuasaan yang sah harus berdasarkan pemberian oleh seluruh komunitas. Gagasan-gagasan tersebut kemudian dirangkum dengan baik dalam pemikiran Locke, Montesquieu dan Rosseau tentang kedaulatan rakyat. Sistem politik Inggris setelah *the gloriousrevolution* (1689), lahirnya Amerika Serikat dan perkembangan konstitusional yang kacau selama Revolusi Perancis tahun 1789-1792 amat penting artinya dalam mengalirkan cita-cita kedaulatan rakyat ke dalam wadah-wadah institusional.<sup>36</sup>

Demokrasi modern adalah anak keruntuhan masyarakat tradisional, struktur struktur sosialnya maupun kepercayaan dan nilai-nilainya. Munculnya demokrasi modern tidak dapat dipisahkan dari tuhan masyarakat feodal dan munculnya masyarakat industrial, rasional dan burjois.

Demokrasi dengan demikian merupakan akibat logis munculnya masyarakat modern. Namun, meskipun asal-usul demokrasi modern berkaitan langsung dengan struktur feodalisme abad Tengah, termasuk dalam pengertian tertentu, akar-akar filosofis demokrasi sesungguhnya menjalar ke masa lampau. Meskipun praktik demokrasi dalam negara modern ternyata tidak mengacu pada pengalaman Yunani kuno sebagai alternatif institusional, dengan demokrasi sebagai alternatif konseptual yang hidup dalam pemikiran politik barat termasuk, Montesquieu dan Rosseau, justru berkembang karena mendapat inspirasi dari Plato dan Aristoteles.

Memang tidak ada garis linear yang menghubungkan secara langsung demokrasi Yunani dengan demokrasi yang direpresentasikan oleh rakyat modern. Demokrasi modern lebih merupakan hasil dari suatu perubahan dalam konsepsi diri

---

<sup>36</sup> Frans Magnis Susenu, dalam M. Nasir Tamara & Elsa Perdi Taher (eds.) *Agama...* h. 127-129.

manusia memang membutuhkan waktu ribuan tahun. Perubahan pemahaman diri manusia itu, secara mendalam berhubungan dengan pengertian baru tentang Tuhan. Berhadapan dengan Tuhan yang sinden perbedaan-perbedaan antara manusia menjadi tidak Hakiki. Sampai disini sesungguhnya perkembangan ini bukan tidak berkaitan erat dengan ide-ide tentang Tuhan dalam agama-agama monoteisme abrahamic (Yahudi, kristen dan Islam).<sup>37</sup>

Dari perspektif historis, fakta bahwa memang diperlukan keruntuhan tatanan feodal abad pertengahan dan pandangan dunianya yang hirarkis, baru pandangan tentang manusia yang egalitarian tersebut dapat menjadi operasional secara politis. Namun, dibalik pengalaman historis ini ada unsur-unsur filosofis dan religius yang coraknya lebih fundamental. Dengan demikian, ide dasar tentang martabat manusia, kesamaan Hakiki semua orang dalam martabat itu, dan oleh karena itu perlunya kekuasaan politik memiliki legitimasi rasional bukanlah semata-mata produk sejarah.

Demokrasi, oleh karenanya, walaupun pada dataran institusional politis merupakan produk peradaban barat namun pada dataran konseptual dia bercorak universal. Sampai disini ditemukan relevansi pernyataan Rousseau, "*were there a people of gods, their government would be democratic*", dengan tuntutan peradaban kontemporer.

Lalu bagaimana dengan Islam..?

### **c. Islam Dan Tantangan Demokratisasi**

Telah dikemukakan, proses perubahan ke arah kehidupan yang memberi kebebasan individu, demokrasi politik, dan kesejahteraan ekonomi akan terus menggelinding seiring dengan semakin berkembangnya aspirasi global. Proses perubahan itu bersifat global kemang meskipun arah dan bentuknya belum dirumuskan secara definitif. Namun, kerangka kebebasan, demokrasi dan

---

<sup>37</sup> Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Men* (New York: Free Press. 1992).

kesejahteraan itu telah mengisi kesadaran umat manusia, Setelah sekian lama diciptakan oleh penindasan, penjajahan dan peperangan demi peperangan.

Setelah manusia merasa lelah itulah mereka sampai pada suatu terma (demokrasi) yang dianggap sebagai ujung dari segala ideologi. Hal ini mendorong pemikiran seperti Francis Fukuyama mengemukakan tesis bahwa sejarah telah berakhir.<sup>38</sup> Sebuah tesis yang kedengarannya agak arogan, namun perlu dicatat bahwa sejarah yang dimaksud bukan dalam pengertian sejarah mikro yang hanya dipandang sebagai pergantian peristiwa-peristiwa, tetapi sejarah dalam pengertian sebuah revolusi yang saling bertalian dalam struktur masyarakat yang tribal primitif, pertanian, melalui teokrasi, monarki dan aristokrasi, hingga akhirnya sampai pada bentuk-bentuk politik yang kita ketahui sekarang seperti demokrasi liberal dan kapitalisme yang dikendalikan secara teknologis.

Tesis yang dikemukakan Fukuyama diperkuat oleh Samuel P.Huntington, dalam gelombang ketiga demokratisasi yang berlangsung dari 1974 yang ditandai dengan runtuhnya rezim rezim diktator pada lebih dari 30 negara baik di Eropa Asia dan Amerika Latin, di samping faktor pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tuntutan standar kehidupan yang melonjak, juga ada faktor penting lain yang mendorong demokratisasi, yaitu agama.<sup>39</sup>

Di negara-negara yang mengalami demokratisasi gelombang ketiga ini, agama Protestan menempati peringkat tertinggi kemudian Katolik, sementara konfusianisme dan Islam masih bermusuhan dengan demokrasi.<sup>40</sup>

Penilaian miring huntington dan banyak pengamat lain mengenai Islam, paling tidak didasarkan pada dua alasan.<sup>41</sup> Pertama, berkaitan dengan masalah konflik

---

<sup>38</sup> Samuel P. Huntington, *Religion and Third Wave* (The National Interest, Summer, 1991), h. 29.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 36.

<sup>40</sup> Riza Sihbudi, "Demokratisasi dalam Pandangan Komunitas Islam: Kasus Timur Tengah" dalam *Jurnal Ilmu Politik*, No. 12 (Jakarta: AIPI & LIPI bekerja sama dengan gramedia, 1993), h. 34.

kekuasaan, dewasa ini goma di banyak negara Islam (khususnya di Timur Tengah), umumnya dikuasai elit politik sekuler, tetapi mereka mendapat tantangan yang semakin meningkat dari gerakan Islam. Dalam beberapa kasus, gerakan Islam beberapa kali mengambil alih kekuasaan (di Iran misalnya), atau berbagi kekuasaan dengan elit sekuler. Karena ini bisa dimengerti jika dalam pertarungan kekuasaan, itu sekuler takut pada gerakan Islam. Kedua, konflik peradaban. Dewasa ini, baik dari segi kultur, politik maupun ekonomi, barat mendominasi dunia, sedangkan peradaban lain dianggap sebagai peradaban "Marginal".

Kebangkitan Islam dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan peradaban Barat, terutama sesudah runtuhnya komunisme. Dalam situasi seperti ini, kekuatan-kekuatan Islam sekuler mempunyai persamaan kepentingan dengan pihak Barat. Dalam hal menolak validasi oposisi gerakan Islam.

Menolak hak bersuara bagi oposisi bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, mereka yang menolak oposisi justru menuduh gerakan Islam sebagai anti demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai suatu sistem yang memberikan kebebasan penuh bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia, Islam tidak berlawanan dengan demokrasi. Dalam Islam tidak ada tempat bagi teokrasi. Karenanya pembuat kebijakan bisa ditentang baik oleh individu maupun organisasi. Bahkan menolak penguasa yang merupakan salah satu tugas terpenting dalam Islam.<sup>42</sup>

Pandangan tersebut didukung oleh beberapa pemikir muslim yang berpandangan bahwa jika yang dimaksud dengan demokrasi itu sistem pemerintahan yang bertolak belakang dengan sistem kediktatoran Islam sesuai dengan demokrasi. Karena di dalam Islam tidak ada tempat bagi pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang yang ditentukan oleh salah satu atau sekelompok orang.

---

<sup>41</sup> Riza Sihbudih, "Demokratisasi dalam Pandangan ...h. 34-35.

<sup>42</sup> John L. Esposito & James P. Piscatori, "Democratization and Islam" dalam *The Middle East Journal*, Vol. 45 No. 3, Summer, 1991.

Dasar dari semua keputusan dan tindakan dari suatu negara Islam bukanlah keinginan atau kehendak individu, tapi adalah *syariat* yang merupakan kumpulan aturan-aturan yang digali dari Al-qur'an dan hadits. John L. Esposito, seorang Islamologi Barat, mengatakan bahwa Islam pada kenyataannya memberikan kemungkinan pada bermacam interpretasi: Islam bisa digunakan untuk mendukung demokratisasi maupun kediktatoran, republikan maupun monarki. Menurut Esposito, reaksi negatif umat Islam terhadap demokrasi barat seringkali merupakan bagian dari penolakan umum terhadap pengaruh kolonial Eropa, sebuah benteng Islam terhadap ketergantungan yang lebih jauh terhadap barat ketimbang suatu penolakan umum terhadap demokrasi.<sup>43</sup>

Karena itu, menurut pandangan Esposito, dalam hal hubungan Islam dengan demokrasi terhadap 3 aliran pemikiran.

Pertama, aliran aliran pemikiran yang berpendapat bahwa Islam didalam dirinya sendiri adalah demokratis, bukan hanya karena prinsip *syura* tetapi juga karena konsep-konsep *ijtihad dan ijma'*. Para pendukung aliran pemikiran ini terdapat tokoh seperti Hamid Enayat, seorang tokoh Islam Iran, yang berpendapat bahwa Islam bisa lolos dari salah satu tes moral demokrasi, yang meskipun bersifat formal tetapi mutlak diperlukan bagi penyelenggaraannya, prakerja yaitu persyaratan bahwa suatu pemerintahan tidak hanya harus berdasarkan hukum kemah tetapi dalam segala keputusannya juga harus memperhitungkan kehendak rakyat yang di perintah. Persyaratan ini, menurut Hamid Enayat, di penuhi oleh prinsip *syura' dan ijma'* yang di gali dari Al-qur'an dan hadits.<sup>44</sup> Hal senada, bahkan leboh ekstrim, di kemukakan Muhammad Asad, seorang pemikir Islam modernis, bahwa lembaga legislatif, majelis *asy-syura*, harus benar-benar mewakili seluruh komunitas, baik pria maupun wanita. Karakter perwakilan demikian hanya dapat di capai melalui pemilu yang bebas,

---

<sup>43</sup> Hamid Enayat Sebagaimana dikutip Riza Sihbudi, *Jurnal Ilmu Politik*...h. 36.

<sup>44</sup> John L. Esposito & James P. Piscatori, "Democratization and Islam" dalam *The Middle East Journal*... h.436.

karenanya para anggota majelis harus di pilih dengan cara-cara yang memungkinkan semua orang terlibat atau berpartisipasi di dalamnya.<sup>45</sup>

Kedua, aliran pemikiran yang menolak gagasan Islam dan demokrasi. Aliran ini muncul di Iran pada tahun 1905-1911 selama berlangsung konstitusional. Syaikh Fadlallah Nuri, selama debat tentang formulasi konstitusi mengemukakan bahwa satu kunci gagasan demokrasi, persamaan semua warga negara, adalah mustahil dalam Islam.<sup>46</sup>

Demikian pula pandangan Sayyid Qutb yang menekankan bahwa sebuah negara Islam harus berdasarkan pada prinsip musyawarah sebagaimana yang tercantum di dalam Al-qur'an. ia percaya bahwa *syari'at* sudah sangat lengkap sebagai suatu sistem moral dan hukum, sehingga tidak di perlukan legislasi yang lain.<sup>47</sup>

Pandangan Syaikh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, salah satu seorang tokoh agama terkemuka di Mesir, dipadukan dengan demokrasi. Sementara itu orang nomor dua dalam jajaran kepemimpinan FIS Aljazair, Ali benHaji, menegaskan bahwa konsep demokrasi harus digantikan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang Islami. Bahkan menurutnya, teoritis barat sendiri sudah mulai menyadari bahwa Demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang cacat.<sup>48</sup>

Pandangan-pandangan menurut Hamid Inayat itu, disayangkan.

Dia berpendapat bahwa semua upaya untuk mensintesis antara Islam dengan demokrasi selalu terbentur pada batu karang yang bernama doktrin yang abadi dan tidak bisa diubah yang merupakan intisari dari semua agama.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 435.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h.436.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Riza Sihbudi, "Demokratisasi"... dalam *Jurnal Ilmu Politik...* h. 37.

Pandangan negatif mengenai hubungan antara Islam dengan demokrasi juga dikemukakan oleh Samuel P Huntington. Iya mengatakan bahwa konsep politik Islam berbeda dan bertentangan dengan konsep politik demokrasi. Di mengakui bahwa di dalam Islam, terdapat unsur-unsur yang sesuai maupun bertentangan dengan demokrasi. Namun, dalam prakteknya, tidak satupun negara Islam yang telah melaksanakan sistem politik demokrasi secara penuh sepanjang masa.

Ia mengemukakan contoh bahwa satu-satunya negara Islam yang pernah menerapkan demokrasi adalah turki dibawa pemerintahan Mustafa Kamal yang di justru secara tegas menolak konsep-konsep Islam.<sup>49</sup>

Ketiga, aliran yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam, tetapi di lain pihak mengakui ada perbedaan antara keduanya yang dalam ungkapan esposito itu dikemukakan sebagai berikut: Like the First school of thought, this line of argument holds that Islam constitutes its own form of democracy. But like the second, concentrates on the relationship between divine and popular sovereignty.

Aliran pemikiran ketiga ini didukung oleh tokoh seperti Abu A'la al-Maududi yang menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi sekuler Barat, pemerintahan dibentuk dan diubah dengan melaksanakan pemilihan umum. Demokrasi dalam Islam menurutnya juga memiliki wawasan yang mirip tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa jika di dalam sistem barat suatu negara demokratis menikmati kedaulatan mutlak, dalam demokrasi Islam, kekhalifahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh hukum Ilahi.<sup>50</sup>

Sementara itu Hamid Inayati mengemukakan bahwa secara historis, cita-cita demokrasi dalam bentuk kebebasan untuk mengemukakan pendapat kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dan berkumpul serta pemerintahan yang telah

---

<sup>49</sup> Abu al-A'la al-Maududi. *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1990), h. 243.

<sup>50</sup> Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'a: Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20* (Bandung: Pustaka, 1988), h. 195.



mengesan dalam pemikiran umat Islam sebagai akibat wajar dari tujuan kemerdekaan dan kesatuan nasional. namun, baga pemikir muslim, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan masalah yang ditimbulkan oleh masalah nasionalisme.

Jika Islam berbenturan dengan postulat-postulat tertentu demokrasi, ini disebabkan karena sifat umum Islam sebagai agama. Sebab setiap agama, tidak bisa tidak akan mengalami konflik yang sama karena kepribadiannya sebagai agama yang mengandung sistem pimpinan yang dilandasi kan pada sejumlah jaran yang mutlak dan tidak bisa diubah, atau pada kekuatan konvensi konvensi atau otorita-otorita tradisional yang diakui.<sup>51</sup>

Enayat percaya bahwa tidak ada bentuk pemerintahan, apapun bentuk politik atau konfigurasi sosial ekonomi, yang dapat disebut demokrasi dengan pengertian yang kita pahami sekarang ini, tanpa didasarkan pada sejumlah prinsip yang tersirat rakyatnya, atau tersurat secara resmi melalui undangan- undangannya.

Yang terpenting dari prinsip-prinsip itu adalah pengakuan akan martabat setiap manusia tanpa memandang kualitas- kualitasnya, pengakuan atas perlunya hukum yaitu himpunan norma-norma yang pasti atau rasional untuk mengatur semua hubungan sosial, kesamaan warga negara di hadapan hukum tanpa memandang Ras, suku atau kelompok, dapat dibenarkannya keputusan-keputusan negara atas dasar persetujuan rakyat ke rumah dan tingkat toleransi yang tinggi terhadap pendapat dengan pendapat tidak konvensional dan tidak ortodoks.

Menurut Enayat, zaman ini, sistem pemerintahan demokratis yang manapun juga tetap melakukan diskriminasi tertentu, baik secara tersirat maupun secara tersurat, yang menguntungkan kepada mereka yang memberikan kesetiaan kepada perhimpunan cita-cita, norma-norma dan lambang-lambang yang membentuk pokok

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 199.

dari suatu konsensus yang dipradugakan, apakah konsensus tersebut adalah 'cara hidup Amerika', atau 'sosialisme ilmiah', atau demokrasi monarki liberal.<sup>52</sup>

Pandangan tersebut memperkuat apa yang dikemukakan oleh W.B Gallie bahwa pada dasarnya, demokrasi merupakan konsep yang masih diperdebatkan dan bukan sesuatu yang dianggap sudah final.

Karena itu masih terbuka peluang untuk mempraktekkan demokrasi yang tidak sama persis dengan yang dipraktekkan oleh negara-negara yang mengklaim diri sebagai negara yang paling demokratis seperti amerika. Yang penting praktik itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang telah melalui perjalanan yang sangat panjang hampir seumur dengan perjalanan peradaban umat manusia. Harus diakui bahwa perjalanan demokrasi ini semakin menemukan bentuknya yang mendekati kesempurnaan di abad modern. Konsep demokrasi merupakan suatu yang diperdebatkan. Tidak satupun negara yang berhak mengklaim sebagai model demokrasi yang harus menjadi model untuk semuanya.

Perbedaan-perbedaan pandangan yang menghina demokrasi tersebut selama ini. Wajar jika di kalangan umat Islam terdapat sikap yang berbeda dalam memberi respon terhadap demokrasi. Para pemikir modern dalam Islam umumnya menganggap demokrasi tidak harus dipertimbangkan dengan Islam, meskipun diakui bahwa demokrasi itu tidak boleh disamakan dengan Islam karena ada hal-hal tertentu yang tidak sesuai-untuk tidak mengatakan bertentangan-dengan Islam. Islam, bicara doktriner, dalam beberapa hal sarat dengan nilai-nilai dasar yang sama dengan nilai-nilai dasar dalam demokrasi. Hal ini didasarkan pada beberapa statemen Al-Qur'an yang menurut Amerika merupakan nilai-nilai universal Al-Qur'an yang demokratis. Terma Al-Qur'an yang dimaksud seperti konsep *Syura* (musyawarah), *Ijma'* (keepakatan), dan *Ijtihad* (penilaian interpretasi yang mandiri) dan terma lain yang

---

<sup>52</sup> Komaruddin Hidayat, "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi" dalam Elsa Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia dan Masa Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 189-200.

dianggap sama dengan banyak konsep dalam tradisi politik Barat. Namun, di samping terma-terma yang dianggap sama dengan konsep-konsep dasar dalam demokrasi, ada juga terma yang tidak sesuai untuk tidak mengatakan bertentangan-dengan demokrasi seperti konsep tentang *Ahl Al-Zimmah*, konsep waris yang membedakan antara bagian laki-laki dengan bagian kaum wanita dan sebagainya.

Sebagian pemikir Islam, walaupun menganggap bahwa Islam sesuai dengan demokrasi, ada sebagian tokoh yang sama sekali tidak bisa menerima konsep bahwa agama dapat disesuaikan atau disamakan dengan konsep demokrasi. Menurut Komarudin Hidayat, hubungan antara agama dan demokrasi, secara garis besar bisa dibedakan menjadi tiga model yaitu: hubungan yang bersifat negatif netral dan positif. Hubungan yang bersifat negatif diwujudkan dalam bentuk memperhadapkan antara agama dengan demokrasi. Hal ini dianut oleh kelompok fundamentalis yang berpendapat bahwa Islam merupakan ajaran yang sudah sempurna dalam pengertian bahwa Islam telah mengatur seluruh persoalan hidup ummat manusia baik secara berkaitan dengan kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Hubungan yang bersifat netral yang diwujudkan dengan memisahkan antara masalah-masalah pemerintahan dengan masalah-masalah keagamaan. Pandangan ini dianut oleh para pendukung paham sekularisme yang menganggap bahwa urusan negara adalah urusan publik sementara urusan agama adalah urusan masing-masing individu.

#### **d. Hubungan Yang Bersifat Positif**

Model yang ketiga ini disebut model *Teo Demokrasi*

Kelompok pendukung model ini berpandangan bahwa agama, baik secara teologis maupun sosiologis, mendukung proses demokratisasi politik, ekonomi maupun kebudayaan. Karenanya, meskipun agama tidak secara sistematis mengajarkan demokrasi tetapi agama memberi etos, spirit dan muatan doktrin yang mendorong bagi terwujudnya kehidupan demokratis.

Persoalan kemudian jika Islam mendukung demokrasi, mengapa di negara-negara Islam kebanyakan dianggap sebagai negara yang tidak demokratis

sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian pemikir barat dan tuduhan seperti itu bukan hal yang tidak beralasan karena memang secara realitas kebanyakan negara-negara Islam utamanya di Tmur Tengah menganut Islam pemerintahan yang berbentuk kerajaan.

### **KESIMPULAN**

Dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem demokrasi yang diterapkan pemerintah oleh rakyat masih diperselisihkan karena suatu kemustahilan melibatkan seluruh rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan suatu pemerintahan. Para pemikir modern Islam umumnya menganggap demokrasi tidak dapat dipertentangkan dengan Islam meskipun diakui bahwa demokrasi itu tidak boleh disamakan dengan Islam.

2. Islam secara doktriner dalam beberapa hal sarat dengan nilai-nilai dasar yang sama dengan nilai-nilai dasar dalam demokrasi. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an yang merupakan nilai-nilai universal al-Quran yang dekmokratis, seperti konsep syura, musyawarah, ijma', penilaian interpretasi yang mandiri dan bayak lagi terma yang dianggap sama dengan konsep dalam tradisi politik Barat.

3. Ada pula tokoh yang sama sekali tidak dapat menerima konsep agama disamakan dengan konsep demokrasi. Agama mendukung proses demokratisasi politik, ekonomi, maupun kebudayaan, meskipun agama tidak secara sistematis mengajarkan demokrasi tetapi agama memberi ekosprit dan muatan doktrinal yang mendorong bagi terwujudnya kehidupan demokratis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Brintin, Crane at. 1962. *All, A History of Civilization*, Vol. I, Englewood Clifs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, Cassinelli, C.W. *The politic of freedom: An Analisis of the Modern Democratic State*, Seatle: 1961. University of Washington Press.

Collie, Rosalie L. 1972. "Jhon Locke" dalam David L. Sill (ed.), *International Encyclopedia of the sicial Sciences*, Vol 9, New York: Macmillan Publishing Company,

- Derathe, Robert. 1972. "Jean Jacques Rousseau" dalam David L. Sill (ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences* Vol. 13, New York: The Macmillan Company & The Free Press,
- Enayat, Hamid. 1988. *Reaksi Politik Sunni dan Syari'ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20*, Bandung: Pustaka.
- Esposito, John L. & James P. Piscatori, 1991. "Democratization and Islam" dalam *The Middle East Journal* Vol. 45 No. 3, Summer.
- Esposito, John L. & John O. Voll, 1991. *Demokrasi di Negara-Negara Muslim* Terjemahan Rahmani Astuti, Bandung: Mizan.
- Frans Magnis Suseno, "Demokrasi: Tantangan Universal" dalam M. Nasir Tamara & Elsa Perdi Taher (eds.) *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Jakarta: Paremadi, 1996.
- Fukuyama, Francis. 1992. *The End Of History and The last Men*, New York: Free Press.
- Gallie, W.B. 1964. *Philosophy and Historical Understanding*, London: Chatto and Windus.
- Haris, Syamsuddin. 1994. *Demokrasi di Indonesia, Gagasan dan Pengalaman*, Jakarta: LP3ES,
- Huntington, Samuel P. 1991. *The Third Wave: Democratization In The Late Twentieth Century*, Norman, Ok.: University Of Oklahoma Press,
- Huntington, Samuel P., 1991. *Religion and Thir Wave*, The National Interest, Summer.
- Komaruddin Hidayat, 1994. "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi" dalam Elsa Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Orde Baru*, Jakarta: Paramadina.
- Maududi, Abu al-A'la, 1990. *al-Hukum dan konstitusi: Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan.
- Picles, Dorothy. 1970. *Democracy*, London: B.T. Batsford Ltd.,

R. Siti Zuhro, 1993. “Demokrasi: Suatu Tinjauan Teoritis” dalam *Jurnal Ilmu Politik*, No. 14, Jakarta: AIPI & LIPI bekerja sama dengan Gramedia,

Riza Sihbudi, 1993. “Demokratisasi dalam Pandangan Islam” Kasus Timur Tengah” dalam *Jurnal Ilmu Politik*, No. 12, Jakarta: AIPI & LIPI bekerja sama dengan gramedia.

Watkins, Fredrick Mundell.1970. “Democracy”, dalam *Encyclopedia Britannica*, Chicago, dll: Encylopedia Brittanica, Inc.